



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UNIT KERJA : BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : T.R. FAHSUL FALAH
2. Jabatan : KEPALA PUSAT
3. NHK : 871389

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **3.308.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 755 m2/70 m2 di KAB / KOTA ACEH
TAMANG, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 2.500.000.000
2. Tanah Seluas 40000 m2 di KAB / KOTA ACEH SELATAN,
WARISAN Rp. 75.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m2/26 m2 di KAB / KOTA ACEH
BARAT DAYA, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/45 m2 di KAB / KOTA ACEH
BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/30 m2 di KAB / KOTA ACEH
SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/30 m2 di KAB / KOTA ACEH
SELATAN, WARISAN Rp. 30.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA
SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/45 m2 di KAB / KOTA
SUMEDANG, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
9. Tanah Seluas 72 m2 di KAB / KOTA SUMEDANG, HASIL SENDIRI
Rp. 23.500.000
10. Tanah dan Bangunan Seluas 202 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 25.000.000

1. MOBIL, DAIHATSU JEEP Tahun 1992, HASIL SENDIRI Rp.
20.000.000
2. MOTOR, HONDA HONDA Tahun 2010, HIBAH TANPA AKTA Rp.
5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 46.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 154.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 3.533.500.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 3.533.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.